

**THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE,
REGIONAL EXPENDITURE AND CAPITAL EXPENDITURE TO THE
FINANCIAL PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENT
(Empirical Study on District and City Governments in Central Java Province
Period 2013-2017)**

Pengaruh Size Pemerintah, Intergovernmental Revenue, Belanja Daerah dan Belanja Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017)

Miftakhul Janah
Universitas Muhammadiyah Magelang
Miftakhuljanah001@gmail.com

ABSTRACT

Regional financial performance is one measure that can be used to see the region's ability to carry out regional autonomy. This study aims to empirically examine the effect of government size, intergovernmental revenue, regional spending and capital expenditure on the financial performance of local governments on the financial performance of local governments in the Regencies and Cities in Central Java Province 2013-2017 period. This type of research is quantitative research with empirical studies. Sampling in this study used a purposive sampling method. The number of samples in this study were 20 regencies and cities in Central Java Province. The data analysis methods used are descriptive statistical tests, classic assumption tests and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that capital expenditure has a positive effect on the financial performance of local governments, while on the financial performance of local governments.

Keyword: *Size of government, intergovernmental revenue, regional expenditure and capital expenditure, financial performance of regional governments*

ABSTRAKSI

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Size pemerintah, intergovernmental revenue, belanja daerah dan belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah*

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai daerah, baik pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam penyelenggaraan perekonomian, setiap daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengelola karena Indonesia menganut asas desentralisasi dengan adanya Otonomi Daerah yang mulai resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Ayuningsih, 2016). Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah (Minarsih, 2015).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terkhusus keuangannya dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Hal tersebut tercermin dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik (Ayuningsih, 2016). Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik sekedar dibelanjakan, namun harus dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien (Indrawan, 2013).

Menurut Halim (2012), mendefinisikan kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja bisa digunakan sebagai ukuran keberhasilan aktivitas dari suatu kegiatan selama periode tertentu (Azhar, 2009).

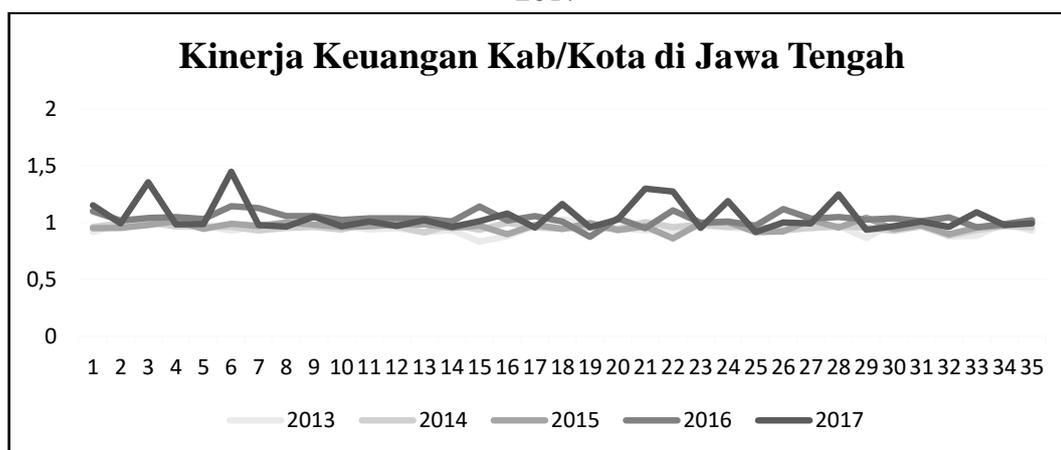
Penilaian terhadap keberhasilan laporan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya bergantung pada opini yang diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD pada Tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 113 (21%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%) dari 415 Pemkab (72%), dan 80 target kinerja

keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah provinsi (IHPS I 2018, BPK).

Peningkatan opini WTP dari tahun 2013 sampai dengan 2017 bertolak belakang dengan LHP yang diselesaikan oleh BPK pada semester I tahun 2018. Dimana masih ditemukannya permasalahan sebesar 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp 1,49 triliun (IHPS I 2018, BPK).

Menurut Pratiwi (2018), Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun terdapat *surplus* atau *defisit* untuk selisih antara pendapatan dan belanja. *Surplus* atau *defisit* bukanlah menjadi kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi dapat dilihat dari seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Berikut kinerja keuangan 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Grafik 1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017



Sumber: Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD 2013-2017

Berdasarkan pada grafik diatas menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 5 tahun. Dari hasil menunjukkan perbedaan bervariasi antara 0,8 sampai dengan 1,4. Kinerja keuangan yang berada dibawah 1 menunjukkan kinerja keuangan yang efisien, karena pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Sedangkan untuk kinerja keuangan yang berada diatas 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan tersebut tidak efisien. Rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 0,99. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 rata-ratanya sebesar 1.03 dan 1.05 yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangannya tidak efisien.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah masih memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Nugroho & Prasetyo (2018) tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap

kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menyatakan bahwa *size* pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Alvini, (2018) dan Febrianto, (2018) menunjukkan bahwa *size* pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini & Erawati, (2016) dan Achmad, (2017) menunjukkan bahwa *size* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Febrianto, (2018) meneliti terkait pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Retnowati, (2016) dan Achmad *et al*, (2017) bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun Penelitian Nugroho & Prasetyo, (2018) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Armaja *et al*, (2015) dan Andirfa *et al*, (2016) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Armaja *et al*, (2015) tentang pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Retnowati, (2016) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nugroho & Prasetyo, (2018) yang menunjukkan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al*, (2016) tentang pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan Alvini, (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Febrianto, (2018) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Prasetyo (2018). Persamaan penelitian yaitu menggunakan semua variabel yang ada. Perbedaannya yaitu **pertama**, menambahkan variabel belanja modal, karena pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al* (2016). Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya diharapkan dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik dan tepat. Dengan dialokasikannya dana belanja modal dengan baik akan menjadikan belanja modal tersebut lebih efisien dan juga akan menambah aset atau kekayaan daerah, sehingga semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedua, objek penelitian yang digunakan, yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alasannya karena dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas opini audit untuk daerah di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat. Masih terdapat beberapa daerah yang kinerja keuangannya selama lima tahun berturut-turut masih mempunyai masalah katidaklengkapan informasi yang diungkapkan pada LKPD. Dan juga terdapat pendapatan dan pengeluaran yang fluktuasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa tengah dalam waktu 5 tahun sehingga kinerja keungan tidak efisien. **Ketiga**, menambah periode dari tahun 2013-2018 yang penelitian sebelumnya dilakukan 4 tahun. Alasannya agar dapat digunakan sebagai perbandingan antar tahun serta diharapkan hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan *non profit* lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak mempunyai informasi khususnya dalam bidang keuangan, diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang diberikan rakyat (Nosihana & Yaya, 2016).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat. Dan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanatkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward*, maka rakyat selaku *principal* akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Anton, 2010).

2. Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Halim (2012) kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau sudah tercapai. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, menuntut adanya akuntabilitas pemerintah dengan mengetahui kualitas kinerja dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

Menurut Halim (2012) pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. APBD

di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Halim (2012) terdapat beberapa analisis rasio di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah:

- a. Rasio Derajat Desentralisasi
- b. Rasio Kemandirian Keuangan daerah
- c. Rasio Efektivitas
- d. Rasio Efisiensi
- e. Rasio Aktivitas
- f. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

3. *Size Pemerintah*

Size pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah (Hartono, 2014). *Size* merupakan suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu (Kusuma *et al*, 2017). *Size* pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut yang diukur menggunakan total aset dari suatu pemerintah. Dengan jumlah aset yang lebih besar diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah aset yang lebih sedikit. Masdianti & Erawati (2016) dan Achmad *et al*, (2017) yang menyatakan bahwa *size* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁. Size Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Darise 2008). Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah (Darise, 2008). Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diterima daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Armaja *et al* (2015) dan Andirfa *et al* (2016) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂. Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

5. *Belanja Daerah*

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah (Halim, 2012). Secara umum prosedur belanja daerah bertujuan untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan pendekatan informasi (Bastian, 2006). Pelaksanaan otonomi memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber yang ada sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya. Melalui pengalokasian belanja daerah yang memadai, kualitas kinerja keuangan daerah dapat ditingkatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Armaja *et al* (2015) dan Retnowati, (2016) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

6. *Belanja Modal*

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin (Ulum & Sofyani 2016). Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Apabila dari sarana dan prasarana memadai, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan di suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al* (2016) dan Alvini (2018) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H₄. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

C. **Metode Penelitian**

Data

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan laporan keuangan di www.djpk.kemenkeu.co.id. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diteliti sebanyak 20 Kabupaten dan Kota. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria.

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2),

uji F dan uji t. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel-variabel tersebut (Ghozali, 2018).

D. Hasil

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
SP	100	519.632.691.872	7.653.463.463.030	3.178.789,88	1.398.517.540.527
IR	100	0,48182	0,75467	0,6310581	0,05204036
BD	100	529.237.634.485	3.197.888.391.969	1.616.399.835.451	568.813.167.304
BM	100	69.203.906.339	678.205.766.264	292.752.217.038	130.189.815.425
KKPD	100	0,83358	1,15400	0,9810411	0,05362223

Sumber data sekunder yang diolah, 2019

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	125
<i>Kolmogrov-Smirnov Z</i>	0,102
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,003

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa besaran nilai *test statistic Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,102 dan nilai signifikansi 0,003. Nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang berarti bahwa data tidak terdistribusi secara normal, sehingga diperlukan *outlier*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Kolmogrov-Smirnov Z</i>	0,077
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,147

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa besaran nilai *test statistic Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,077 dan nilai signifikansi 0,147. Nilai signifikansi $0,147 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Colinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
SP	0,820	1,219	Tidak Terjadi Multikolinearitas
IR	0,944	1,059	Tidak Terjadi Multikolinearitas
BD	0,427	2,344	Tidak Terjadi Multikolinearitas
BM	0,449	2,228	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 dari setiap independennya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokolerasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokolerasi

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std, Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
0,660	0,436	0,412	0,04111293	1,621

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian autokolerasi dengan menggunakan uji *Durbin-watson* diperoleh nilai 1,621. Nilai DW berdasarkan tabel untuk $N = 100$ dan $k = 4$ diperoleh $d_l = 1,592$ dan $d_u = 1,758$, sehingga $d_l < d < d_u$ atau $1,592 < 1,621 < 1,758$. Keputusan yang didapat berdasarkan nilai tersebut adalah *no decision* atau ragu-ragu sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokolerasi. Karena terdapat autokolerasi maka nilai *standard error* (SE) dan nilai *t* statistik tidak dapat dipercaya sehingga diperlukan pergantian alat uji, yaitu menggunakan *run test*. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil uji autokolerasi menggunakan *run test* ditunjukkan pada tabel 6:

Tabel 6
Hasil Uji Runt Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value</i>	0,00463
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,546

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa *run test value* adalah 0,00463 dengan probabilitas 0,546 nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa $0,546 > 0,05$ maka residual mengalami random atau tidak terjadi autokolerasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Glesjer

Variabel	Sig.	Keterangan
SP	0,931	Tidak terjadi heteroskedastisitas
IR	0,432	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BD	0,094	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BM	0,041	Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa signifikansi variabel belanja modal kurang dari 0,05, sehingga pada persamaan regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Problem heteroskedastisitas tersebut dapat diobati dengan mentransformasikan variabel yang terkena heteroskedastisitas kedalam bentuk akar kuadrat, kemudian diuji kembali dengan uji *glesjer*. Adapun hasil ditunjukkan pada tabel 8:

Tabel 8
Hasil Uji Glesjer setelah pengobatan

Variabel	Sig.	Keterangan
SP	0,652	Tidak terjadi heteroskedastisitas
IR	0,585	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BD	0,532	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BM	0,276	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi setelah ditransformasikan terlihat bahwa nilai signifikansi semua variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,384	0,354		-3,914	0,000
SP	-0,011	0,011	-0,084	-1,015	0,312
IR	0,093	0,049	0,144	1,887	0,062
BD	-0,031	0,017	-0,228	-1,816	0,073
BM	0,099	0,014	0,856	6,862	0,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 9 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KKPD = -1,384 - 0,011SP + 0,093IR - 0,031BD + 0,099 BM + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
0,680	0,463	0,440	0,04081

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,440. Hal ini berarti bahwa variabel *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal memberikan pengaruh sebesar 44% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya 56% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b. Uji F

Tabel 11
Hasil Uji F (*Goodness of Fit*)

Model	F Hitung	F Tabel	Sig.
<i>Regression</i>	20,461	2,46	0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah,2019

Tabel 11 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 20,461 > F tabel = 2,46 dan *p value* 0,000 < $\alpha = 0,05$. Berdasarkan jumlah $n = 100$ dan $k = 4$, maka $df_1 = 4$ dan $df_2 = 100$ maka diperoleh nilai tabel sebesar 2,46. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tersebut sudah bagus (*fit*).

c. Uji T

Tabel 12
Hasil Uji t

Variabel	Hipotesis	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
SP	Positif	-1,015	1,660	0,312	H ₁ tidak diterima
IR	Negatif	1,887	1,660	0,062	H ₂ tidak diterima
BD	Positif	-1,816	1,660	0,073	H ₃ tidak diterima
BM	Positif	6,862	1,660	0,000	H ₄ diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

a) Pengaruh *Size* pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa $t_{hitung} = -1,015 < t_{tabel} = 1,660$ dan $p_{value} = 0,312 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *size* pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah, sehingga **H₁ tidak diterima**. Artinya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak didasarkan pada *size* pemerintah. Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah merupakan aset yang kurang produktif (tidak menambah pendapatan daerah) untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak selaras dengan teori *stewardship* yang diungkapkan oleh (Donaldson dan Davis, 1991) yang menyatakan bahwa jika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya. Pemerintah daerah sebagai *steward* yang menjalankan fungsinya mengelola keuangan daerah harus mempertanggungjawabkan kinerja keuangan daerah kepada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar terdorong untuk meningkatkan kinerja keuangannya, sehingga akan menunjukkan kepatuhannya terhadap peraturan pemerintah.

Ketidakselarasan teori dengan hasil penelitian diduga karena dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah aset tetap lebih dominan daripada aset lancar. Selain itu aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah tidak dapat mendorong terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari sisi lain jumlah aset daerah yang dimiliki menyebabkan sulitnya pengawasan pemerintah untuk dapat memonitor masing-masing aset secara langsung. Kesulitan pengawasan tersebut menjadikan berbagai tindak penyalahgunaan atas aset yang dimiliki daerah, sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan pada penelitian ini tidak selaras dengan teori bahwa *size* pemerintah yang besar dapat memiliki kinerja keuangan yang baik dibandingkan dengan pemerintah yang asetnya sedikit. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Masdianti & Erawati (2016) dan Achmad (2017) yang menyatakan bahwa *size* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Nugroho & Prasetyo (2018) yang menemukan bukti empiris bahwa *size* pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b) Pengaruh *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa t hitung = 1,887 > t tabel = 1,660 dan p value = 0,062 > α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga **H₂ tidak diterima**. Artinya, *intergovernmental revenue* suatu daerah tidak dijadikan alasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut

karena pemerintah daerah tidak mampu menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan maksimal.

Terkait teori *stewardship*, semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah daerah (*steward*) yang telah diberi wewenang untuk mengelola dana perimbangan dari pemerintah pusat (*principal*) dituntut untuk menjadi *steward* yang mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana perimbangan untuk alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah yang mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi maka akan terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan daerah guna meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah pusat.

Ketidakselarasan teori dengan hasil penelitian diduga karena masih kurangnya kontrol dari pemerintah pusat terhadap penggunaan *intergovernmental revenue* sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Masih rendahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga *intergovernmental revenue* yang diterima oleh pemerintah daerah tidak digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tergolong masih rendah.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori bahwa *intergovernmental revenue* dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Armaja *et al*, (2015) dan Andirfa *et al*, (2016) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Retnowati, (2016), Achmad *et al*, (2017) dan Febrianto, (2018) yang menemukan bukti empiris bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c) Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa $t \text{ hitung} = -1,816 < t \text{ tabel} = 1,660$ dan $p \text{ value} = 0,073 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga **H₃ tidak diterima**. Artinya, semakin tinggi belanja pegawai tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diduga karena proporsi belanja daerah yang rendah dan tidak merata dalam struktur APBD pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal.

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai pihak *steward* berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*principal*). Pelayanan tersebut dapat diberikan melalui pengalokasian belanja modal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Apabila dari sarana dan prasarana suatu daerah memadai diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemenuhan pelayanan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Sehingga semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka akan semakin meningkat tingkat efisiensi kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah.

Tidak terbuktinya teori dan hasil tersebut menunjukkan ketidakselarasan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Hal tersebut diduga karena jumlah proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti belanja pegawai daripada digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang produktif seperti belanja modal. Rendahnya proporsi belanja modal dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, yang kemudian akan mempengaruhi produktivitas perekonomian.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori yang menyatakan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Armaja *et al*, (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Nugroho & Prasetyo, (2018) yang menemukan bukti empiris bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

d) Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa t hitung = 6,862 > t tabel = 1,660 dan p value = 0,000 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga **H₄ diterima**. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pada suatu daerah. Sehingga dengan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai mampu meningkatkan tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan teori *stewardship*, semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap

kinerja keuangan disuatu daerah. Pemerintah daerah selaku *steward* sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Apabila tujuan ini tercapai oleh pemerintah daerah, maka masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan belanja modal yang optimal membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah (*steward*) dengan rakyat (*principal*) agar memberikan kepuasan bagi publik serta dapat mendukung terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Andirfa *et al*, (2016) dan Alvini, (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) sampel yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota dengan periode waktu selama 5 (lima) tahun.

Hasil *Adjusted R²* menunjukkan hasil bahwa variabel independen yang terdiri dari *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal mampu menjelaskan variasi variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 44%, sedangkan sisanya 56% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari pada F tabel, artinya mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah secara baik dan model yang digunakan dalam penelitian ini sudah bagus (*fit*). Hasil uji t menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Daftar Pustaka

- Achmad *et al*. (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22.
- Alvini, Y. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Feb*, 1(1), 1–14.

- Andirfa *et al.* (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 8(5), 30–38.
- Armaja *et al.* (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(September), 168–181.
- Ayuningsih, D. (2016). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Azhar, S. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko, Pengembangan*. Edisi Pertama. Bandung : Lingga Jaya.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi sektor Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- Donaldson, L., & Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory : CEP Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16.
- Febrianto, N. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*, 15(2).
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang : FE UNNES.
- <http://www.BPK.go.id>, diakses 9 Maret 2019
- <http://www.jatengprov.go.id>, diakses 9 Maret 2019
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, diakses 30 April 2019
- Indrawan, Y. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanudin*.
- Kusuma *et al.* (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 403–420.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal *Akuntansi Universitas Udayana*, 1150–1182.
- Minarsih, R. (2015). Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Retnowati, R. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*.
- Ulum, & Sofyani. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Yogyakarta: Aditya Media.